

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manuel Castell dalam bukunya yang berjudul *The Network Society: From Knowledge To Policy* mengklaim bahwa dunia saat ini cenderung mengalami transformasi sosial yang diakibatkan oleh adanya teknologi komunikasi sejak tahun 1970. Masyarakat informasi yang diindikasikan mulai muncul setelah tahun 1970 disebut dengan *knowledge society*.¹ Kendati masyarakat berupaya untuk menyesuaikan teknologi sesuai kebutuhan, teknologi justru menciptakan struktur sosial baru (Castells, Manuel et. al: 2005, 3). Perkembangan teknologi informasi tersebut ternyata tidak saja membawa keuntungan bagi masyarakat global melainkan membawa tantangan tersendiri. Manuel Castells menyimpulkan fenomena ini sebagai era Masyarakat informasi yang didefinisikan sebagai berikut:

The Network Society, in the simplest terms, is a social structure based on networks operated by information and communication technologies based in microelectronics and digital computer networks that generate, process, and distribute information on the basis of the knowledge accumulated in the nodes of the networks (Castells, Manuel et al.: 2005, 7)

Transformasi sosial tersebut ditandai dengan kemunculan energi listrik yang membedakan antara masyarakat biasa dengan masyarakat industri. Masyarakat industri erat kaitannya dengan mereka yang memiliki barang-barang kapital dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan (Castells, Manuel et. Al: 2005, 3).

¹ “Knowledge Society” atau masyarakat pengetahuan merupakan pembeda dari era keterbatasan sejarah kepada era informasi. Masyarakat pengetahuan diklaim Castells merupakan struktur sosial baru yang diciptakan oleh teknologi yang mengontrol kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu negara

Teknologi merupakan jawaban dari keterbatasan inovasi dalam masyarakat. Satu hal yang membedakan antara keterbatasan inovasi dalam era sebelum 1970 dengan era 1970 adalah peran dari jaringan. Jaringan didefinisikan sebagai hubungan antara gereja, negara, perusahaan-perusahaan, dan pasukan militer yang saling terkait satu sama lain untuk menciptakan sebuah kehidupan (Castells, Manuel et. Al: 2005, 5). Unit-unit di dalam masyarakat informasi sendiri menciptakan jaringan-jaringan baru yang dikendalikan melalui instrumen teknologi komunikasi.

To be sure, the network society manifests itself in many different forms, according to the culture, institutions, and historical trajectory of each society, as the industrial society encompassed realities as different as the United States, and the Soviet Union, England or Japan, while still sharing some fundamental features that were recognized as defining industrialism as a distinct form of human organization—not determined by the industrial technologies, but unthinkable without these technologies (Castells, Manuel et al.: 2005, 7).

Sebagai konsep, masyarakat informasi bukan menjadi istilah baru bagi ilmuwan-ilmuwan Hubungan Internasional. Albert-La'szlo' Baraba'si (2000) pernah melakukan penelitian tentang hubungan antara perkembangan teknologi dengan masyarakat yang disebut dengan konsep *scale free networks*. Baraba'si (2000) menerjemahkan *scale free networks* sebagai sebuah jaringan masyarakat yang bisa muncul dan menghilang sesuai dengan pola *nodes* dan hubungan antar *nodes* tersebut. Meminjam konsep masyarakat informasi dari Manuel Castells, Baraba'si menyimpulkan bahwa jaringan komunikasi masyarakat bersifat hierarkis. Sebuah masyarakat yang memiliki pola interaksi dalam sebuah jaringan bersifat dinamis dan tidak memiliki pusat. Hubungan dari satu *nodes* ke *nodes* yang lain sama-sama penting dan memiliki tugas sendiri-sendiri. Interaksi dari jaringan dalam masyarakat informasi mengakibatkan timbulnya perubahan-

perubahan yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut secara masif. Interaksi tersebut bahkan bisa jadi menciptakan jaringan-jaringan baru yang tidak mengenal skala dan tempat. Manuel Castells menegaskan bahwa posisi metodologis masyarakat informasi tidak berada dalam level teoritik. Masyarakat informasi dipandang sebagai sebuah gejala sosial yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan hidup masyarakat. Sejalan dengan Barabasi, Gustavo Cardoso (2004) menggunakan istilah masyarakat informasi sebagai era yang membedakan antara generasi pengguna teknologi informasi dengan generasi yang belum menggunakan teknologi informasi. Belajar dari pengalaman Portugal, Cardoso menyebutkan bahwa era sarat inovasi teknologi informasi telah menjembatani pertukaran informasi antara negara-negara Latin yang memiliki persamaan latar belakang sejarah dan budaya. Berdasarkan dorongan dari Spanyol dan Brazil, Portugal menjadi tokoh protagonis dalam arus demokratisasi selama tiga dekade terakhir (Huntington dalam Cardoso: 2004, 25).

Berkesinambungan dengan urgensi pengamatan dinamika ekonomi dalam globalisasi, Joseph E. Stiglitz sebagai teoris globalisasi ekonomi memiliki klaim yang berbeda. Globalisasi menurut Stiglitz (2006) berpotensi membawa perubahan yang baik terutama bagi negara-negara berkembang. Kehadiran rezim institusi internasional dibutuhkan bagi negara berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan bangsa sesuai dengan rekomendasi yang diresepkan oleh institusi internasional (Stiglitz: 2006). Stiglitz menandai sejumlah kawasan, seperti Asia Timur, yang mulai menuai keuntungan dari interdependensi ekonomi melalui kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional. Rekomendasi ide-ide globalis

ekonomi tentang kebutuhan bersikap waspada terhadap tantangan-tantangan tidak terduga dari globalisasi, membuat tesis Manuel Castells menjadi sangat penting untuk dibahas. Berlawanan dengan afirmasi Stiglitz tentang keuntungan jaringan kapitalisme dari fenomena masyarakat informasi di perusahaan multinasional, Jeremy Fuchs mengklaim bahwa fenomena masyarakat informasi membawa kerugian bagi buruh-buruh yang bekerja di perusahaan multinasional. Penetapan standar kualitas minimum pekerja dapat menimbulkan efek domino seperti pengangguran struktural, kemiskinan, pengecualian sosial, deregulasi hak-hak buruh, hingga pemotongan upah buruh (Fuchs: 2007, 50).

Manuel Castells berupaya untuk menegaskan proses terjadinya masyarakat informasi melalui penjelasan tentang kompleksitas hubungan antar jaringan masyarakat. Jaringan-jaringan tersebut dapat terjadi di tengah-tengah masyarakat, negara, atau bahkan perusahaan-perusahaan besar. Di dalam *Theoretical Blueprints* yang diterbitkan pada tahun 2004, Manuel Castells mengklaim bahwa fenomena masyarakat informasi berkembang hingga dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan besar memiliki andil dalam menciptakan jaringan-jaringan bisnis masif sebagai aset utama. Kebutuhan untuk memperluas keuntungan secara global menjadi pendorong bagi pelaku-pelaku bisnis internasional untuk mendirikan jaringan bisnis yang menuntut akselerasi dan fleksibilitas pada setiap bidangnya. Jika perusahaan besar diklaim Castells memiliki jaringan, maka perusahaan kecil dan menengah menjadi bagian dari *nodes* atau simpul-simpul dari jaringan tersebut. Jaringan yang diciptakan oleh perusahaan besar biasanya dibentuk melalui kerjasama, aliansi, atau kemitraan. Pembentukan jaringan melalui

mekanisme aliansi dan kemitraan dihubungkan melalui proyek-proyek yang didasarkan kepada sebuah tujuan utama. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui kolaborasi produksi, proses produksi, waktu, dan tempat. Jika di dalam sebuah perusahaan terdapat tuntutan untuk melakukan produksi dalam jumlah besar dengan waktu yang paling efisien, maka mitra perusahaan lain harus mampu mengikuti standar-standar tersebut. Kendala waktu dan tempat dapat diatasi dengan adanya inovasi teknologi.

Memandang semakin kompleks jaringan yang bisa diciptakan oleh sebuah perusahaan multinasional, muncul kecurigaan bahwa penyesuaian kultur perusahaan multinasional pada level manajerial tingkat atas berpengaruh terhadap kesejahteraan buruh di cabang-cabang perusahaan multinasional di negara-negara lain. Tuntutan penyesuaian kultur dan sistem regulasi sebuah perusahaan multinasional yang harus bersifat global, diindikasikan berpengaruh terhadap perubahan kultur dan perilaku pekerja di Indonesia. Kehadiran inovasi teknologi yang dapat memberikan akselerasi dan pengurangan biaya komunikasi memberikan ruang luas bagi perusahaan multinasional untuk semakin memperlebar eksistensi tidak saja dalam bisnis multinasional namun dalam ekonomi global. Philip Morris International (PMI) yang menjadikan Sampoerna sebagai afiliasi di Indonesia merupakan contoh perusahaan multinasional yang memiliki jaringan perusahaan global.

Penggunaan teknologi dalam pencapaian tujuan sebuah perusahaan ternyata tidak hanya berdampak kepada pertukaran informasi melainkan terhadap pertemuan antara permintaan dengan penawaran, dan produsen dengan konsumen.

Perusahaan besar dituntut untuk dapat melakukan produksi sekaligus manajemen baik secara lokal maupun global, yang didasarkan kepada tren ekonomi global. Perusahaan yang bertugas sebagai penentu tren dan regulasi wajib bersifat *self-programmable*, dan mampu mengikuti proses-proses penyebaran informasi (Castells: 2004, 71). Berdasarkan ilustrasi Castells tentang perkembangan fenomena masyarakat informasi dapat dilihat bahwa pekerja (*labor*) menjadi bagian penting dari sebuah jaringan perusahaan. Pekerja berfungsi sebagai eksekutan atau pelaku dari regulasi-regulasi perusahaan. yang diposisikan sesuai dengan standar keahlian masing-masing dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan. Mengutip karakteristik pekerja jaringan perusahaan Castells, terdapat tiga kategori pekerja yaitu: Pertama, mereka yang bertugas sebagai sumber inovasi; kedua, mereka yang menjadi pelaku instruksi; ketiga, mereka sebagai pekerja serabutan (e.g tidak memiliki pendidikan baik dan tinggal di wilayah buruh infrastruktur) atau lebih dikenal dengan istilah buruh. Melalui studi kasus yang dilaksanakan di Sampoerna yang berlokasi di Pandaan Jawa Timur diharapkan terlihat hubungan antara penyesuaian tuntutan jaringan bisnis dalam masyarakat informasi dengan kesejahteraan buruh di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan tentang sejauh mana masyarakat informasi melalui “jaringan masyarakatnya” berpengaruh bagi kesejahteraan buruh di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam konteks Sampoerna sebagai afiliasi PMI di Indonesia, penelitian ini mengajukan pertanyaan apakah terdapat korelasi positif antara fenomena

masyarakat informasi dengan peningkatan kesejahteraan buruh dalam lingkup perusahaan multinasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan pengujian empiris melalui kasus Sampoerna terhadap korelasi positif antara konsep masyarakat informasi dan kesejahteraan buruh sejak tahun 2005. Selain itu, terkait dengan kasus yang diteliti maka dilakukan pengamatan terhadap bentuk korelasi sehingga menghasilkan afirmasi terhadap tesis Manuel Castells.

1.4 Studi Terdahulu

Kehadiran perusahaan multinasional memperoleh respon yang berbeda-beda diantara negara berkembang. Thailand adalah salah satu negara yang menggiatkan diri kepada penerimaan perusahaan multinasional, dengan tujuan mengembangkan kapasitas pembangunan terutama dalam bidang otomotif. Di dalam riset yang ditulis oleh Lugkana Worashincai dan Aurilla Aurelie Bechina, kehadiran Toyota membawa dampak positif bagi kesejahteraan buruh yang diikuti dengan naiknya standar hidup buruh. Worashincai dan Bechina (2010) menyebutkan bahwa era informasi yang diklaim oleh Manuel Castells membawa keuntungan berupa pemerhatian tinggi terhadap upah buruh dalam pasar tenaga kerja. Castells mengklaim bahwa negara yang memfokuskan diri kepada perkembangan kesejahteraan sosial melalui media penerimaan investasi asing, wajib memperhitungkan aspek persaingan dalam pasar modal dan pasar tenaga kerja. Perhitungan strategi pemanfaatan buruh lokal bagi perusahaan multinasional yang

berkembang di negara tersebut hanya bisa tercapai melalui jaringan-jaringan informasi yang telah dibangun oleh negara yang bersangkutan (Castells dalam Worashincai: 2010, 5). Terhitung sejak tahun 2007, pemerintah Thailand berupaya untuk membuka jaringan perusahaan multinasional sebagai strategi untuk menjual buruh-buruh kompeten dalam pasar tenaga kerja Thailand yang dinilai mampu bersaing dalam level global (Worashincai dan Bechina: 2010, 2).

Thailand adalah negara dengan tingkat investasi otomotif padat jika dilihat dari faktor-faktor seperti perkembangan pasar domestik, stabilitas politik, perdagangan bebas. Industri otomotif merupakan industri terbesar ketiga di Thailand, dengan total tenaga kerja sebanyak 225.000 karyawan, dan kapasitas produksi sekitar 1.270.100 mobil dan truk per tahun (Worashincai dan Bechina: 2010, 1). Pada tahun 2003 Toyota meletakkan cabang perusahaannya di Thailand, menjadikannya sebagai perusahaan multinasional bidang otomotif terbesar. Toyota melakukan merger dengan perusahaan-perusahaan otomotif lokal di Thailand dan mengadakan kerjasama dengan sejumlah universitas. Sejak tahun 2003, Toyota mengadakan seleksi yang sangat ketat terhadap kualitas tenaga kerja. Salah satu karakteristik yang diterapkan adalah jenis tenaga kerja yang tidak hanya mengerti tentang persoalan mekanik melainkan memiliki akselerasi yang baik untuk kepentingan transfer ilmu pengetahuan. Karakteristik tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Toyota banyak ditemui di universitas-universitas di Thailand. Dampak yang dirasakan dari tenaga kerja Toyota adalah tingginya penghargaan terhadap hak-hak buruh, salah satunya upah. Perbandingan antara upah buruh di Toyota dengan upah buruh di perusahaan otomotif domestik terpaut

jauh. Selain itu, buruh yang pernah bekerja di Toyota memiliki daya saing yang kuat dan menarik bagi pemerhati pasar tenaga kerja. Hal ini membuat buruh keluaran Toyota dapat dengan mudah dipekerjakan di perusahaan multinasional lain dalam bidang yang sama (Worashincai dan Bechina: 2010, 4)

Banyak studi telah dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari berdirinya perusahaan multinasional, terutama Toyota, di Thailand (Gafaru dan Meyer dalam Worashincai: 2010, 4). Dalam dua dekade terakhir, globalisasi telah memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan yang signifikan dalam investasi asing di negara-negara berkembang, dengan menjanjikan stabilitas politik dan struktural (Castells dalam Worashincai: 2010, 4). Selain itu didapatkan kesimpulan bahwa perusahaan multinasional memainkan peran dalam menciptakan pekerjaan baru dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan buruh. Para pekerja domestik di Toyota mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga upah yang sangat tinggi untuk hasil kinerja mereka. Tingginya upah yang ditawarkan dan pelayanan kesehatan yang baik sangat berbanding terbalik dengan yang disediakan oleh perusahaan otomotif domestik sebelum tahun 2003. Dampak keberadaan Toyota dan mergernya terhadap perusahaan-perusahaan otomotif kecil memberikan efek domino bagi Thailand. Kehadiran Toyota di Thailand memiliki potensi peningkatan upah tahunan sehingga meningkatkan daya beli buruh, yang berdampak pada menyebabkan pembayaran pajak meningkat. Ketersediaan sumber daya yang lebih akan memungkinkan pemerintah untuk menghabiskan lebih banyak uang bagi

sektor kesejahteraan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Mengutip tesis Manuel Castells, era informasi dalam globalisasi diklaim menjadi kekuatan yang mendorong penyerapan keuntungan masyarakat Thailand terhadap kehadiran perusahaan multinasional. Keuntungan investasi oleh perusahaan multinasional membuat negara-negara berkembang lebih mudah menerima perubahan sosial dan ekonomi saat harus memasuki pasar global yang menuntut adopsi nilai-nilai modern dan praktek bisnis (Castells dalam Worashincai: 2010, 6). Negara tuan rumah harus memfasilitasi operasi perusahaan multinasional untuk mendapatkan dana dari saluran dari Bank Dunia, organisasi pembangunan internasional atau organisasi nirlaba. Sebagaimana karakteristik dari masyarakat informasi, kebutuhan pengembangan teknologi berbeda di antara negara-negara berkembang dan bahkan dalam beberapa kasus antar daerah. Sebagai contoh, Thailand selatan lebih berkembang daripada beberapa daerah di wilayah utara. Kesenjangan pengembangan teknologi disebabkan oleh mayoritas jumlah konsumen teknologi di Thailand selatan dibandingkan dengan kota lainnya. Transfer pengetahuan dan teknologi lebih cepat terjadi di wilayah selatan karena lebih banyak perusahaan multinasional. Membangun kemampuan industri membutuhkan kerjasama teknologi antara perusahaan lokal dan internasional, pemerintah dan lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan (Worashincai dan Bechina: 2010, 6). Dalam rangka perbaikan infrastruktur Thailand, penyediaan sumber daya seperti listrik, air, hingga bahan baku industri dibutuhkan kerjasama antara perusahaan multinasional dengan masyarakat lokal. Toyota sebagai contoh,

berkontribusi besar dalam memberikan landasan bagi pengembangan teknologi dan pertumbuhan industri otomotif domestik bagi perusahaan domestik atau subkontraktor dengan menyediakan peralatan atau teknologi yang lebih efisien. Terlepas dari adanya kesenjangan perkembangan teknologi di Thailand, Toyota sebagai perusahaan multinasional disimpulkan banyak memberikan efek domino bagi kesejahteraan buruh domestik.

Berlawanan dengan pengaruh positif perusahaan multinasional bagi kesejahteraan buruh Thailand, Silicon Valley sebagai perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang inovasi teknologi menjadi momok bagi buruh internasional. Pengurangan tenaga kerja dan timpangnya hak serta kewajiban buruh di perusahaan multinasional bukan menjadi cerita baru bagi negara berkembang. Dampak negatif dari keberadaan perusahaan multinasional ternyata tidak saja dirasakan oleh negara berkembang melainkan oleh sebagian negara maju. Silicon Valley merupakan contoh perusahaan besar yang membawahi ratusan perusahaan multinasional bidang inovasi teknologi di seluruh dunia. Manuel Castells berpendapat, perusahaan dan negara yang memfokuskan diri kepada peningkatan teknologi produksi dan perbaharuan sistem manajemen cenderung menarik tenaga kerja di seluruh penjuru dunia. Masalah yang dapat ditimbulkan adalah kemungkinan terjadinya fraksi dalam negara tersebut karena jumlah populasi berbanding terbalik dengan tenaga kerja berkualitas (Castells dalam Schmidt: 2004, 4). Tingginya standar produksi di Silicon Valley dan sistem manajemen yang kompleks mempengaruhi masa kerja buruh. Tidak semua orang bisa menjadi seorang teknisi komputer atau analis keuangan, tetapi hanya orang-

orang dengan pendidikan yang cukup yang mampu meningkatkan kapabilitas individulah yang paling dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan sistem manajerial yang kompleks.

Silicon Valley merupakan contoh perusahaan yang membedakan jenis buruhnya menjadi buruh harian dan buruh tetap (Schmidt: 2004, 2). Sistem pembagian buruh merugikan bagi kelangsungan hidup buruh Silicon Valley. Sistem pembagian buruh ini berlaku bagi seluruh perusahaan pengembang teknologi di seluruh dunia, salah satunya adalah Hewlett Packard sebagai perusahaan multinasional pengembang chip mikro dan komputer. Sama dengan perusahaan multinasional lainnya, Hewlett Packard diwajibkan untuk merekrut tenaga kerja sesuai dengan stereotipe bangsa dan keahlian, misalnya meletakkan hanya bangsa Eropa sebagai teknisi. Rekrutmen tenaga kerja berdasarkan ras memberatkan bagi kawasan Asia yang minim penduduk bangsa Eropa. Buruh tetap ditugaskan untuk mengkhususkan diri kepada satu bidang aspek produksi atau pengawas bagi cabang perusahaan multinasional. Buruh harian direkrut untuk menyumbangkan ide-ide baru untuk sebuah inovasi teknologi. Apabila ide yang disumbangkan tidak sesuai dengan standar maka buruh harian tidak boleh kembali di kantor Silicon Valley.

Alan Hyde sebagai penulis buku *Working In Silicon Valley* mengklaim buruh sebagai pekerja informasi. Terinspirasi oleh tesis era informasi dan masyarakat informasi Manuel Castells, Hyde menyatakan bahwa buruh informasi harus waspada terhadap kecepatan mobilisasi pasar tenaga kerja dengan sumber daya manusia yang lebih fleksibel terhadap perubahan teknologi (Hyde dalam

Schmidt: 2004, 3). Silicon Valley menuntut buruh tetapnya untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan teknologi, oleh karena itu sedikit keterlambatan mempengaruhi masa kerja buruh. Tesis dasar Hyde menyatakan bahwa buruh harian adalah pihak yang paling dirugikan oleh sistem tenaga kerja di Silicon Valley (Hyde dalam Schmidt: 2004, 3). Pembayaran hanya untuk produksi saat itu juga dan secara tunai. Pengaturan ini memiliki kelebihan dan kekurangan baik untuk perusahaan multinasional yang dibawah oleh Silicon Valley maupun untuk buruh. Buruh harian perlu mendapatkan pengawasan sehingga Silicon Valley menugaskan tim khusus untuk memonitor kinerja dari buruh harian bagi seluruh perusahaan bidang teknologi yang berada di bawah naungan Silicon Valley. Tugas dari pengawas tidak saja untuk memonitor perkembangan buruh harian melainkan memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk memajukan kinerja. Perusahaan yang diawasi menjadi pihak yang harus bertanggung jawab terhadap pembayaran pengawas buruh harian. Hyde menemukan kesimpulan bahwa 70 persen buruh harian tidak kembali untuk bekerja keesokan harinya karena kalah bersaing dengan buruh tetap. Meskipun demikian, masa kerja buruh tetap juga ditentukan dengan tingkat inovasi yang mampu dihasilkan. Dampaknya adalah perusahaan kewalahan mencari SDM baru sementara kesejahteraan buruh harian dan buruh tetap yang sudah ada belum terjamin. Tidak terjaminnya kesejahteraan buruh dicerminkan dari ketidaktersediaan jaminan layanan kesehatan dan dana pensiun akibat cepatnya pergantian SDM di Silicon Valley (Schmidt: 2004, 5).

Studi kasus Toyota dan Silicon Valley memberikan dua jenis korelasi antara peningkatan kesejahteraan buruh dengan fenomena masyarakat informasi. Pada studi kasus Toyota, Worashincai dan Bechina berupaya untuk mengafirmasi tesis Manuel Castells tentang keuntungan era informasi dalam menaikkan standar upah buruh. Berlawanan dengan Toyota, tingginya standar dan kompleksitas manajemen dalam Silicon Valley tidak menjadi jaminan adanya percepatan transfer teknologi dan pengetahuan, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan buruh. Pengkhususan stereotipe bangsa dan keahlian di Silicon Valley membuat negara induk tidak mampu menyerap tenaga kerja domestik sehingga harus melakukan impor tenaga kerja. Dibandingkan dengan kasus di Silicon Valley ilustrasi Toyota di Thailand lebih mewakili kondisi di Indonesia. Dengan demikian diasumsikan bahwa keberadaan perusahaan multinasional turut memberikan kontribusi bagi kesejahteraan buruh sebagaimana kontribusi Toyota terhadap Thailand.

1.5 Kerangka Teori

Penyusunan kerangka teori dalam penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan hubungan antar konsep. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan instrumen analisis untuk mendeskripsikan dugaan terhadap korelasi positif antara fenomena masyarakat informasi terhadap kesejahteraan buruh Sampoerna. Meskipun belum ada sumber akuntabel berkenaan dengan penyebutan masyarakat informasi sebagai sebuah teori, peneliti berupaya untuk menyarikan konsep-konsep yang terkandung dalam masyarakat informasi yang berhubungan erat dengan globalisasi, kapitalisme global, investasi asing, dan

kesejahteraan buruh. Melalui pendapat para ahli yang telah terlebih dahulu menggunakan fenomena masyarakat informasi sebagai instrumen analisis dalam globalisasi ekonomi, perlu kiranya memperhatikan hubungan antar konsep seperti yang dirumuskan di bawah ini.

Korelasi Investasi Asing, Akuisisi dan Kesejahteraan Buruh

Berkenaan dengan latar belakang permasalahan penelitian, kecenderungan yang dapat dilihat adalah akuisisi Sampoerna diduga mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Akuisisi perusahaan lokal oleh perusahaan asing merupakan salah satu contoh keterbukaan suatu negara terhadap masuknya investasi asing. Akuisisi perusahaan asing terhadap perusahaan lokal tidak selamanya lebih banyak mengakibatkan pensiun dini bagi buruh. Asumsi yang kerap kali disimpulkan oleh pengamat ekonomi global, kompetensi buruh lokal tidak dapat dibandingkan dengan buruh impor. Sebaliknya, pada beberapa kasus di Indonesia perusahaan asing seperti PMI, BAT, Exxon Mobile, hingga Slumberger justru mengembangkan potensi buruh lokal melalui upaya beasiswa hingga pembekalan pendidikan internal. Optimisme tersebut disampaikan Joseph E. Stiglitz dalam bukunya yang berjudul *Making Globalization Work*. Stiglitz (2006) mengklaim bahwa kapitalisme yang diwujudkan melalui keterbukaan suatu negara terhadap investasi asing tidak saja menguntungkan negara tersebut melainkan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi buruh dalam skala internasional. Hal ini diwujudkan karena perusahaan multinasional memerlukan citra positif untuk mencapai tujuan utama pendirian perusahaan yaitu maksimalisasi keuntungan (Stiglitz: 2006, 220). Citra perusahaan multinasional yang dapat menghubungkan

jaringan pasar internasional dapat diperoleh melalui indikator perhatian terhadap okupasi buruh lokal yang diwujudkan melalui peningkatan standar kesejahteraan buruh. Selain keuntungan materi, salah satu instrumen penilaian standar kesejahteraan buruh diperoleh melalui pengembangan kompetensi buruh lokal di perusahaan multinasional yang bersangkutan.

Dengan mengikuti pola efek dari keterbukaan pemerintah terhadap investasi asing milik Stiglitz maka elemen analisis yang patut diperhatikan ialah tingkat rekrutmen tenaga kerja Indonesia di Sampoerna. Elemen lain yang harus diperhatikan adalah sejauh mana kompetensi buruh bisa berkembang setelah bergabung dengan Sampoerna. Stiglitz memberikan pola keuntungan negara berkembang yang dapat diraih melalui investasi asing melalui indikator terciptanya jaringan pasar internasional (Stiglitz: 2006, 199).

Dugaan terhadap adanya fenomena masyarakat informasi melalui peningkatan kesejahteraan buruh perusahaan multinasional tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kapitalisme global dan investasi asing. Di dalam artikelnya yang berjudul "Transnational Space And The Network Society" Chritian Fuchs berupaya untuk mengkritik tesis Manuel Castells berkenaan dengan fenomena masyarakat informasi dalam perusahaan multinasional. Fuchs menyimpulkan bahwa teknologi informasi telah memunculkan sejumlah bentuk situasi politik, ekonomi, dan sosial kontemporer. Situasi kontemporer tersebut diwujudkan melalui interaksi antar jaringan yang terbentuk oleh unit-unit seperti negara. Pada abad ke 21 unit-unit jaringan tersebut berkembang, tidak saja hanya dalam level negara melainkan dalam level non negara, tidak terkecuali hingga sektor ekonomi

(Fuchs: 2007, 49). Mengutip dari pernyataan Manuel Castells tentang hubungan antara *nodes*, sistem komunikasi, dan tujuan performa dalam jaringan informasi, Christian Fuchs mengklaim bahwa di dalam perusahaan multinasional buruh-buruh dimanfaatkan sebagai aktor penghubung *nodes* yang berupaya untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perusahaan dengan media teknologi internet. Teknologi digunakan untuk saling bertukar informasi, mengukur tujuan dan sistem kerja perusahaan, dan memproyeksi tingkat persaingan dengan jaringan perusahaan lain. Kegiatan pemanfaatan teknologi oleh aktor-aktor *nodes* di dalam sebuah jaringan perusahaan multinasional diklaim Fuchs segmentatif, ada yang menggunakan kegiatan tersebut dalam skala politik, ekonomi, dan kebudayaan. Meskipun demikian bukan tidak mungkin pemanfaatan kegiatan jaringan perusahaan multinasional mempengaruhi kebijakan suatu negara, atau kontrol ekonomi sebuah kawasan regional.

Fuchs secara lebih lanjut menjelaskan bahwa kultur kapitalisme jaringan perusahaan multinasional bisa berdampak negatif. Pengangguran struktural, kemiskinan, pengecualian sosial, deregulasi hak-hak buruh, hingga pemotongan upah buruh merupakan konsekuensi dari jaringan kapitalisme global. Sebuah perusahaan multinasional dengan mudah dapat melakukan sinergi informasi terhadap tren ekonomi global sehingga apabila dibutuhkan, maksimalisasi profit dapat berakibat kepada penurunan kesejahteraan sosial kaum buruh. Perusahaan multinasional yang melakukan interaksi dan komunikasi melalui jaringan-jaringan yang diciptakan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan ekonomi global. Tuntutan adaptasi terhadap ekonomi global membuat perusahaan

multinasional mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan penyesuaian institusi dan sistem kerja yang dapat difungsikan di seluruh jaringan perusahaannya yang tersebar di seluruh dunia.

Efek Globalisasi Terhadap Peningkatan Kualitas Kehidupan Buruh

Berkenaan dengan tuntutan negara untuk bersaing dalam ekonomi global, globalisasi merupakan era penuh peluang bagi peningkatan taraf hidup buruh. Joseph E. Stiglitz (2006) menyatakan bahwa perusahaan multinasional dibutuhkan untuk menjangkau seluruh dunia dalam menyatukan pasar, teknologi, dan modal yang dimiliki oleh negara-negara maju dengan kapasitas produksi yang dimiliki oleh negara berkembang. Kemampuan perusahaan multinasional dalam menyatukan pasar, teknologi, dan modal merupakan kesempatan bagi buruh untuk dapat menjual ilmu dan keahlian yang dimiliki. Menurut Stiglitz, ilmu dan keahlian dalam era informasi merupakan sebuah komoditas yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar (Stiglitz: 2006, 290). Selain itu, peluang buruh untuk mendapatkan perlindungan hukum dan atensi dari masyarakat internasional menjadi semakin tinggi. Semakin besar perusahaan multinasional maka atensi terhadap kesejahteraan moral dan materil buruh cenderung akan lebih besar karena berimbas kepada citra perusahaan yang bersangkutan. Stiglitz mencontohkan tentang kasus perlakuan buruk pemasok sepatu Nike terhadap buruh lokal di Vietnam menimbulkan pencitraan buruk yang disusul dengan merosotnya saham Nike pada tahun 2003. Pasca kejadian pemberitaan perlakuan negatif Nike terhadap buruh lokal Vietnam, banyak organisasi lokal yang berinisiatif untuk menyuarkan keadilan buruh pada forum-

forum internasional (Stiglitz: 2006, 289). Kasus Vietnam membuktikan bahwa globalisasi memberikan peluang bagi buruh untuk mendapatkan perlindungan moral dan materil karena buruh merupakan aset dari sebuah perusahaan multinasional. Tingginya atensi masyarakat internasional terhadap buruh memicu naiknya standar upah buruh minimal yang disusul dengan naiknya tingkat keamanan buruh.

Globalisasi, Transfer Teknologi Dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh

Selain menaikkan standar hidup buruh melalui keamanan hukum dan materi, fenomena masyarakat informasi memberikan peluang lain berupa transfer teknologi dan pengetahuan. Di dalam kasus penurunan kualitas industri di Jerman ada tahun 1990, Uni Eropa memberlakukan sebuah kebijakan yang disebut dengan Lisbon Knowledge. Fungsi dari kebijakan Lisbon Knowledge adalah untuk mengakselerasi indutsri Jerman, terutama industri mobil untuk dapat menyesuaikan target pasar internasional Uni Eropa (Soete: 2004, 137). Dalam rangka melakukan sinergi pengetahuan dan teknologi standar Uni Eropa, perusahaan skala menengah dan kecildiwajibkan untuk menggunakan jasa *Research &Development* yang diwujudkan melalui kerjasama dengan universitas atau institusi akademik setempat. Perkembangan penggunaan laboratorium R&D memberikan kesempatan penghematan biaya publisitas pemantauan dinamika perusahaan tersebut dalam level global. Jaringan-jaringan yang dibentuk oleh laboratorium R&D dalam sebuah perusahaan tidak saja memberikan informasi tentang perkembangan bisnis melainkan memberikan proyeksi tentang kelemahan dari jaringan perusahaan rival (Soete: 2004, 140). Sepuluh tahun pasca upaya

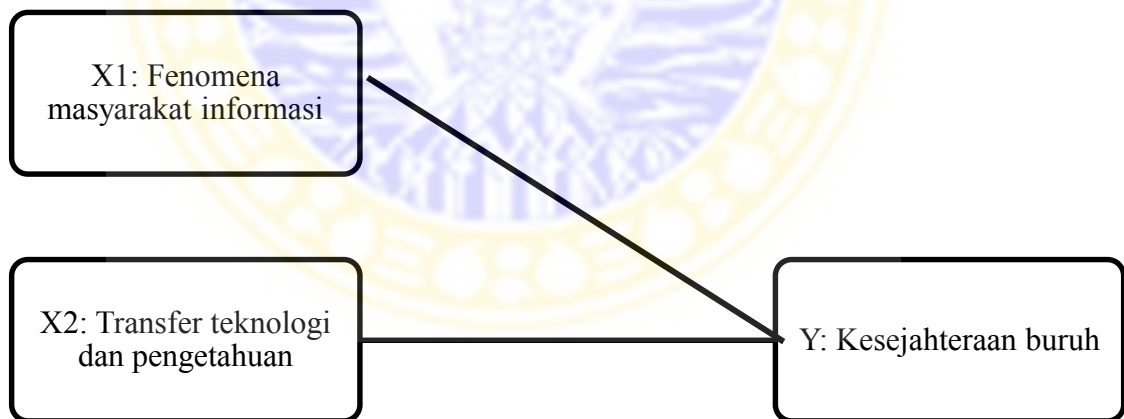
pencapaian target Uni Eropa terhadap perusahaan menengah dan kecil di Jerman, standar keahlian buruh dan kemajuan teknologi di Jerman menjadi yang paling pesat berkembang di Uni Eropa. Terlepas dari pembelokan isu Lisbon Knowledge oleh kebijakan agrikultur Uni Eropa, buruh Jerman yang paling optimal dalam memanfaatkan akses terhadap R&D memiliki kompetensi keahlian yang terbaik di Uni Eropa.

Melalui studi kasus di Jerman, Luc Soete memberikan gambaran tentang kebutuhan persamaan standar kompetensi perusahaan. Selain sebagai akselerasi iklim bisnis di suatu negara, keuntungan dari sinergi pengetahuan dan teknologi berguna untuk memberikan proyeksi dari kelemahan jaringan perusahaan rival. Ilustrasi tersebut membuktikan bahwa kebutuhan penciptaan jaringan komunikasi tidak saja dilaksanakan untuk memudahkan transfer teknologi dan pengetahuan melainkan untuk memperluas eksistensi sebuah perusahaan multinasional (Soete: 2004, 143). Dalam kaitannya dengan kesejahteraan buruh, Soete memberikan pola hubungan antara transfer teknologi dan pengetahuan yang berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi buruh.

1.6 Hipotesis

Melalui tiga teorisasi tentang adanya kapitalisme melalui investasi asing, efek globalisasi terhadap peningkatan taraf hidup buruh, dan hubungan antara transfer teknologi dan pengetahuan dengan peningkatan kesejahteraan buruh, penelitian ini memberikan hipotesis tentang korelasi positif antara keberadaan fenomena masyarakat informasi dengan kesejahteraan buruh melalui studi kasus

di PMI afiliasi Indonesia. Korelasi positif ditunjukkan melalui keberadaan fenomena masyarakat informasi mempengaruhi intensitas transfer teknologi dan pengetahuan yang berbanding lurus dengan semakin tingginya aspek kesejahteraan yang dirasakan oleh buruh. Tingginya intensitas fenomena masyarakat informasi diperoleh melalui indikator perkembangan dan ketersediaan teknologi sedangkan kesejahteraan buruh diperoleh melalui indikator kesejahteraan materil dan non materil. Dengan demikian diketahui bahwa kesejahteraan buruh merupakan variabel dependen yang bergantung kepada masyarakat informasi dan transfer teknologi dan pengetahuan sebagai variabel independen. Rumusan hipotesis dapat disimak melalui gambar di bawah ini:



Melalui kedua studi terdahulu diketahui bahwa korelasi positif dari fenomena masyarakat informasi dan kesejahteraan buruh pada studi kasus Toyota diperoleh melalui analisis hubungan antara pengaruh transfer teknologi dan

pengetahuan dengan peningkatan kompetensi sebagai indikator dari kesejahteraan buruh. Berlandaskan kepada studi terdahulu dan tiga kerangka teori elemen transfer teknologi dan pengetahuan merupakan variabel independen yang dioperasionalisasi bersamaan dengan fenomena masyarakat informasi. Dengan demikian, dinamika kedua variabel independen tersebut mempengaruhi nilai dari kesejahteraan buruh. Sistematika operasionalisasi selanjutnya akan di bahas pada sub bab berikutnya.

1.7 Definisi Konseptual

Kapitalisme global. Dalam upaya mengkaitkan keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap perusahaan multinasional, dalam hal ini akuisisi Sampoerna, maka tidak dapat terlepas dari konsep kapitalisme global. Merujuk kepada pendapat Joseph E. Stiglitz, kapitalisme global merupakan optimisme kemajuan ekonomi bagi negara berkembang pasca kebijakan Konsensus Washington (Stiglitz: 2010, 66). Salah satu kegagalan negara berkembang untuk dapat bersaing secara ekonomi pada tingkat global adalah karena minimnya perhatian pada pembangunan yang berkelanjutan dimana pertumbuhan ekonominya harus berkelanjutan secara ekonomi, politik, sosial, termasuk di dalamnya terkait kesejahteraan dan kemakmuran buruh (Stiglitz: 2010, 66-67). Konsep kapitalisme global selanjutnya oleh Stiglitz bukan hanya menguntungkan institusi finansial melainkan membuka peluang bagi negara berkembang untuk terlepas dari dependensi terhadap hutang luar negeri. Optimisme tersebut antara lain dapat diwujudkan dengan membuka peluang investasi asing yang mampu menciptakan

stabilitas keuangan di negara yang bersangkutan, bukan investasi asing yang mengambil keseluruhan aset negara.

Era informasi. Berpedoman kepada definisi Gustavo Cardoso, era informasi adalah suatu kondisi umum dimana masyarakat memanfaatkan teknologi sebagai interpretasi terhadap suatu gejala sosial (Castells dan Cardoso: 2005, 2). Misalnya interpretasi warga Amerika Serikat terhadap bentuk kesejahteraan buruh identik dengan persepsi warga Kanada karena terjadi kesepahaman indikator yang didapat melalui percakapan di telepon. Merujuk kepada era informasi menurut Manuel Castells, terbentuknya jaringan-jaringan komunikasi merupakan elemen vital yang membedakan antara masyarakat non teknologi dengan masyarakat teknologi. Dalam konteks buruh dan perusahaan multinasional, buruh menjadi *nodes* bagi perusahaan untuk memastikan tercapainya tujuan dari perusahaan multinasional yang bersangkutan.

Kesejahteraan buruh. Menurut ILO, buruh adalah seseorang pada tingkat usia tertentu dan pada periode tertentu menerima serta melakukan pekerjaan untuk kemudian diberikan upah (ILO: 2010, 2). Masih menurut ILO, buruh yang tergolong sejahtera adalah mereka yang menerima *decent work* atau pekerjaan layak dengan upah yang memadai (ILO: 2010, 2-3). Karakteristik dari *decent work* antara lain:

1. Produktifitas buruh wajib dibarengi dengan kelayakan hidup buruh
2. Adanya peraturan yang memuat hak dan kewajiban yang jelas dari perusahaan kepada buruh

3. Perusahaan wajib memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada buruh dan berpeluang untuk mengembangkan kapasitas buruh tanpa adanya eksploitasi
4. Memungkinkan terciptanya keadilan dan partisipasi buruh pada kegiatan non produksi

Transfer teknologi dan pengetahuan. Sebagai indikator fundamental dalam fenomena masyarakat informasi, transfer teknologi dan pengetahuan penting untuk diperhatikan. Dalam konteks perusahaan multinasional, transfer teknologi dan pengetahuan didefinisikan sebagai keseragaman bentuk dan fasilitas teknologi antara perusahaan induk dengan perusahaan cabang di seluruh dunia. Keseragaman fasilitas teknologi menuntut operator dan pengguna dengan kompetensi yang sepadan. Penggunaan teknologi menjadi portal tempat terjadinya pertukaran informasi dan pembentukan jaringan komunikasi antar buruh di seluruh perusahaan multinasional yang bersangkutan.

1.8 Definisi Operasional

Di dalam operasionalisasi konsep-konsep di atas, diperlukan pemberian ukuran-ukuran sebagai prosedur pengukur dalam penelitian ini. Melalui konsep-konsep yang telah didefinisikan di atas, maka dapat diperoleh indikator-indikator seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Kapitalisme global. Pengukuran indikator kapitalisme global berpedoman kepada definisi kapitalisme global seperti yang dijelaskan oleh Joseph E. Stiglitz. Sehubungan dengan PMI yang menjadikan Sampoerna sebagai afiliasi di Indonesia, maka diindikasikan adanya keterbukaan Indonesia terhadap investasi

asing. Dengan demikian indikator yang patut diperhatikan adalah peran pemerintah dalam akuisisi Sampoerna. Indikator memuat hal-hal berkaitan dengan siapa rezim yang bersangkutan dan bentuk kebijakannya terhadap investasi asing.

Era informasi. Berkenaan dengan pembentukan persepsi buruh sebagai *nodes* dalam jaringan informasi melalui fasilitas teknologi. Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan mengenai eksistensi era informasi adalah sebagai berikut: Pertama, persepsi buruh sebelum bekerja di Sampoerna. Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan darimana informasi perihal rekrutmen tenaga kerja dan *track record* perusahaan multinasional didapatkan sehingga menarik minat buruh untuk bergabung. Kedua persepsi buruh selama bekerja di Sampoerna. Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kepuasan buruh dalam tanggung jawab versus hak selama bekerja di Sampoerna. Ketiga pola komunikasi antar buruh. Pola komunikasi dilihat berdasarkan jenis media yang digunakan buruh untuk saling bertukar komunikasi dengan kolega baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Kesejahteraan buruh. Berpedoman kepada karakteristik buruh sejahtera seperti yang dirumuskan oleh ILO, diperoleh indikator antara lain: Pertama peluang rekrutmen tenaga kerja. Diperoleh melalui perhatian terhadap persyaratan bagi penduduk asli Indonesia untuk melamar kerja di Sampoerna. Perhatian terhadap persyaratan mencakup jenjang pendidikan, usia, jenis kelamin, dan etnis. Kedua kesesuaian antara hak dan tanggung jawab. Diperoleh melalui mengetahui durasi kerja harian dengan upah; fasilitas kesehatan keluarga; dana pendidikan; kesediaan fasilitas internal perusahaan e.g transportasi, kantin, tempat

ibadat; asuransi jiwa; dana pensiun. Ketiga kesempatan pengembangan kompetensi buruh. Mencakup hal-hal seperti tersedianya beasiswa, pertukaran antar karyawan seluruh dunia, dan kesempatan naik jabatan

Transfer teknologi dan pengetahuan. Ketersediaan fasilitas teknologi harus didukung dengan kompetensi buruh agar terjadi manfaat berupa pertukaran informasi. Indikator yang patut diperhatikan antara lain: Pertama kesediaan teknologi yang berbanding lurus dengan *skill* buruh. Semua buruh diberikan fasilitas dan mampu mengoperasikan piranti komputer dan internet, tersedia layanan internet tanpa batas, adanya portal komunikasi baik internal maupun eksternal perusahaan, dan pertukaran informasi lebih banyak dilakukan melalui internet. Kedua pembekalan ilmu bagi buruh Pendidikan bagi buruh yang belum memiliki pengalaman kerja, intensitas pembekalan *skill* bagi buruh dalam kurun waktu satu tahun. Ketiga penyesuaian kultur manajemen PMI di Sampoerna. Kesamaan struktur organisasi antara PMI di seluruh dunia, kesamaan pembagian tugas dan tanggung jawab antar jenjang karir buruh, perbandingan struktur organisasi sebelum dan sesudah Sampoerna diakuisisi, dan perbandingan syarat rekrutmen tenaga kerja sebelum dan sesudah Sampoerna diakuisisi.

1.9 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif dengan metode evaluatif. Berdasarkan tujuan dari penelitian diketahui bahwa upaya studi kasus di PMI dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi keberadaan fenomena masyarakat informasi sebagaimana yang diklaim oleh Manuel Castells. Komponen utama permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah membuktikan korelasi

positif antara fenomena masyarakat informasi dengan peningkatan kesejahteraan buruh dalam lingkup perusahaan multinasional. Dengan demikian penting untuk membuktikan apakah fenomena masyarakat informasi memberikan manfaat bagi kesejahteraan buruh di Indonesia melalui transfer teknologi dan pengetahuan seperti yang diklaim dalam hipotesis.

Metode evaluatif digunakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik (Krathwol: 1993, 127). Manfaat yang dimaksud dalam penelitian adalah berkenaan dengan kesejahteraan buruh sedangkan praktik yang dimaksud berkenaan dengan fenomena masyarakat informasi. Memandang dari kebutuhan penelitian untuk mengafirmasi tesis Manuel Castells maka metode evaluatif merupakan metode yang paling sesuai digunakan.

Kekuatan dari metode evaluatif terletak pada kemudahan pencarian rekomendasi untuk kasus yang tersedia (George, Alexander: 2005, 67). Alexander L. George merekomendasikan tiga tahapan penggunaan studi kasus lapangan dengan metode evaluatif yaitu: pertama penentuan kelas dan sub-kelas dari sebuah kasus; kedua kasus dalam penelitian wajib menggugah minat peneliti dengan tingkat problematika yang tinggi; dan ketiga pemetaan variabel teori harus jelas dan hirarkis (George, Alexander: 2005, 69).

1.10 Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan penyebutan globalisasi sebagai era terjadinya fenomena masyarakat informasi, penelitian dilaksanakan untuk membuktikan keberadaan

dari fenomena tersebut. Urgensi negara dalam mengejar perkembangan zaman melalui fasilitas dari globalisasi didapatkan salah satunya melalui jalur investasi asing. Melalui studi kasus akuisisi Sampoerna tahun 2005, peneliti mengetengahkan permasalahan seputar nasib kesejahteraan buruh dalam globalisasi. Pelaksanaan studi kasus dilaksanakan untuk menampilkan dampak dari akuisisi terhadap kesejahteraan buruh sampai dengan tahun 2014. Buruh merupakan salah satu kaum yang bisa menerima dampak positif maupun negatif dari kapitalisme melalui investasi asing. Penjabaran ciri-ciri dan manfaat dari fenomena masyarakat informasi menjadi bahasan utama yang selanjutnya dianalisis dalam penelitian ini.

1.11 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data primer, studi lapangan dilaksanakan pada sebuah perusahaan multinasional di Indonesia. PT HM Sampoerna merupakan afiliasi PMI sebagai salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Nama dan lokasi penelitian antara lain: PT HM Sampoerna yang beralamat di Jl Raya Surabaya-Malang km 51,4, Sukorejo Kabupaten/Kota *Pandaan*, kode pos 67161.

Pengumpulan data primer di Sampoerna dilakukan selama tiga minggu dan terlaksana pada minggu pertama hingga ketiga bulan Agustus 2014.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan jenis data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan

sumber primer berjenis angket atau kuesioner untuk buruh Sampoerna dan wawancara untuk jajaran manajer serta pimpinan perusahaan.

Selain sumber primer, penelitian melakukan pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan informasi seputar hubungan antara globalisasi, fenomena masyarakat informasi, sejarah akuisisi perusahaan, dan kesejahteraan buruh. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui media sebagai berikut: Pertama artikel jurnal ilmiah. Kedua, artikel situs berita online terpercaya. Ketiga, media massa cetak, dan keempat, buku.

1.13 Teknik Analisis Data

Dalam memberikan jawaban terhadap masalah penelitian, data primer berupa kuesioner dan wawancara diprioritaskan untuk memberikan penjelasan tentang bentuk kesejahteraan yang dirasakan oleh buruh selama bekerja di Sampoerna. Angket atau kuesioner memuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertutup yang dibagikan kepada sampel narasumber buruh dari Sampoerna. Area pertanyaan terletak kepada skala kepuasan fasilitas teknologi, transfer pengetahuan, hingga hak-hak materil yang dirasakan buruh selama bekerja di Sampoerna. Selain itu, materi pertanyaan memuat hal-hal tentang naik atau turunnya performa kerja buruh selama bekerja di Sampoerna. Sesuai pertimbangan dari Sampoerna, jumlah angket dengan jenis jawaban tertutup disebar secara acak pada sebanyak 30 narasumber buruh yang juga dipilih secara acak. Sebanyak 30 narasumber buruh dipilih oleh Sampoerna dengan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin, dan jabatan yang berbeda-beda.

Wawancara dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada narasumber yang berasal dari populasi manajer atau pimpinan perusahaan. Sesuai dengan persetujuan dari Sampoerna, teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah angket wawancara dengan jenis pertanyaan terbuka. Jumlah narasumber manajer yang disetujui sebanyak tiga orang. Ketiga narasumber populasi manajer dipilih secara acak dengan perbedaan usia, asal departemen, dan wewenang yang acak pula. Pelaksanaan wawancara dalam bentuk angket dipilih atas persetujuan dari PT Sampoerna Surabaya melalui pertimbangan efektifitas waktu. Hasil wawancara di dokumentasi ulang untuk memudahkan proses analisis data. Materi pertanyaan adalah seputar sistem manajemen, rekrutmen tenaga kerja, hingga penyesuaian kultur kerja PMI di Sampoerna. Hasil wawancara digunakan untuk memperhatikan adanya korelasi data antara hasil kuesioner buruh dengan regulasi dan sistem PMI yang diterapkan di Sampoerna. Kedua hasil studi lapangan digunakan untuk memberikan afirmasi terhadap ajuan hipotesis.

Data-data sekunder dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan berupa informasi tentang sejarah akuisisi Sampoerna hingga seputar teorisasi penelitian. Melalui pendapat para ahli, pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan ciri-ciri keberadaan fenomena masyarakat informasi dan korelasinya terhadap kesejahteraan buruh di perusahaan multinasional. Keseluruhan data baik primer maupun sekunder akan dijelaskan secara kualitatif.

1.14 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian secara lenih lanjut disusun dalam lima bab yang memuat informasi sebagai berikut:

Bab pertama memuat keseluruhan proposal berupa prosedur metodologi penelitian. Substansi dari keseluruhan proposal memuat hal-hal dasar seperti latar belakang, rumusan masalah, studi terdahulu, hingga hipotesis.

Bab kedua memuat pengantar pembahasan hasil studi kasus Sampoerna yang telah dijadikan perusahaan afiliasi di Indonesia oleh Phillip Morris International. Bab kedua selanjutnya memuat teorisasi terkait posisi buruh perusahaan multinasional dalam era kapitalisme global di Indonesia. Selain itu bab 2 memuat ringkasan mengenai sejarah kehadiran PMI di Indonesia.

Bab ketiga memuat pembahasan hasil studi kasus Sampoerna. Pada bab ketiga fokus terletak pada upaya menjawab permasalahan tentang korelasi positif antara fenomena masyarakat informasi terhadap kesejahteraan buruh di Sampoerna. Dengan demikian, elemen substansial dalam bab ketiga adalah menghadirkan sejumlah data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Pengolahan data diberikan baik dalam bentuk perhitungan prosentase dalam bagan maupun rangkaian kata deskripsi bagan.

Bab keempat memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang pada prinsipnya menjawab pertanyaan apakah hasil pengumpulan dan analisis data pada bab dua dan tiga mendukung atau tidak mendukung hipotesis. Bab keempat sekaligus memuat konsekuensi dari pernyataan pertama berupa afirmasi atau falsifikasi dari manfaat fenomena masyarakat informasi terhadap

kesejahteraan buruh di perusahaan multinasional. Selain itu, bab ketiga juga menjelaskan tentang temuan-temuan yang berpotensi untuk dilanjutkan oleh peneliti lain.

